
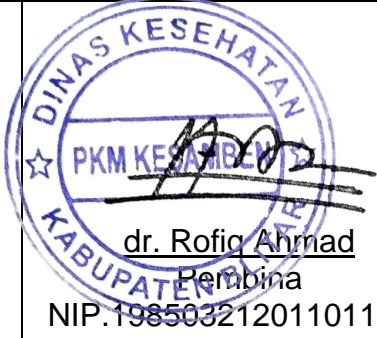
	PENANGANAN EFEK SAMPING KONDOM				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KB/724
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		29-04-2023
	Halaman	:	1/2		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN				 <p>dr. Rofiq Ahmad Pembina NIP.198503212011011014</p>	
1.PENGERTIAN	Penanganan Efek Samping Kondom adalah penanganan suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan yang timbul dari alat kontrasepsi kondom.				
2.TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalis keluhan keluhan yang dialami akseptor implant. 2. Meyakinkan akseptor agar tidak pindah ke alat kontrasepsi lainnya. 3. Membantu akseptor untuk memilih kontrasepsi yang diinginkan. 				
3.KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 Tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN) 				
4.REFERENSI	Modul Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Edisi Pertama Tahun 2016				
5.ALAT DAN BAHAN	ATK				
6.TAHAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menjelaskan tentang efek samping KB Kondom yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondom rusak atau diperkirakan bocor (sebelum berhubungan), menganjurkan akseptor untuk membuang dan memakai kondom baru atau memakai spermisida digabung kondom. ➤ Kondom bocor atau dicurigai ada curahan di vagina saat berhubungan, menyarankan akseptor untuk mempertimbangkan pemberian Morning After Pill. 				

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dicurigai adanya reaksi alergi (spermisida), memberikan kondom alami (produk hewani:lamb skin atau gut) atau bantu klien memilih metode kontrasepsi yang lain. ➤ Mengurangi kenikmatan hubungan seksual, menganjurkan pemakaian metode lain.
7. UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIA 2. Pustu 3. Puskesmas 4. Posyandu
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis 2. General consent 3. Register KB 4. ABPK
9. BAGAN ALIR	-

Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/90/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)	29 April 2023